

# PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TERHADAP PEREKONOMIAN DI KABUPATEN SORONG SELATAN

## *THE EFFECT OF DIRECT EXPENDITURE AND INDIRECT EXPENDITURE TO THE ECONOMY IN THE SOUTHERN DISTRICT SORONG*

**Felix Farel Maga, Krest D. Tolosang dan Agnes L. Ch. Lopian**

*Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

*Universitas Sam Ratulangi Manado 95119, Indonesia*

*Email : felixfarelmaga@yahoo.com*

### ABSTRAK

Pengeluaran pemerintah adalah dapat bersifat "exhaustive" yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain lagi. Di samping itu pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat "transfer" saja yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan kepada subsidi atau mungkin pula kepada Negara lain sebagai hadiah (grants). Jadi "exhaustive expenditure" menghasilkan faktor-faktor produksi dari sektor swasta kepada sektor pemerintah. Sedangkan "transfer payments" hanya menggeser tenaga pembeli dari unit-unit ekonomi yang satu kepada unit-unit ekonomi yang lain dan membiarkan yang terakhir ini menentukan dari penggunaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk seberapa besar pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap perekonomian Kabupaten Sorong Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari kantor Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Dinas Pengelolaan Keuangan asset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Berganda. Hasil analisis diketahui bahwa secara parsial atau bersama-sama belanja langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian kabupaten Sorong Selatan dan belanja tidak langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Perekonomian Kabupaten Sorong Selatan. Kemudian secara simultan kedua variabel secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Sorong Selatan.

*Kata Kunci* : Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Perekonomian.

### ABSTRACT

*Government spending is that it can be "exhaustive" which is the purchase of goods and services in the economy that can be directly consumed or can also to produce other goods again. In addition, government spending can also be "transfer" only in the form of transfer of money to individuals for social purposes, the affiliated companies to the subsidies or possibly to other States as a gift (grants). So the "exhaustive expenditure" produced the factors of production from the private sector to the government sector. While the "transfer payments" just shift the buyer power of economic units are the economic units to the other and the latter membiarkan determine from the usage. This study aims to how much influence the spending of direct and indirect spending on the economy of South Sorong Regency. The data used in this research is secondary data obtained from the office of South Sorong District Government and the Office of Financial Management and Revenue asset District South Sorong. The analytical method used is Multiple Regression. Analysis showed that the partial run private or direct spending together significant no effect on the economy of South Sorong district and not having an indirect expenditures in significant against South Sorong Regency Economy. Later simultaneously both variables together no effect on the economy of South Sorong Regency.*

*Keyword*: Shopping Direct, Indirect Expenditures, Economic.

## 1. PENDAHULUAN

Pengeluaran pemerintah adalah dapat bersifat “exhaustive” yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain lagi. Di samping itu pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat “transfer” saja yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan kepada subsidi atau mungkin pula kepada Negara lain sebagai hadiah (grants).

Otonomi Daerah merupakan realisasi dari ide desentralisasi. Menurut Sidki (2000), konsep desentralisasi terdiri desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administrative (*administrative decentralization*), dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*). Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap perekonomian di Kabupaten Sorong Selatan.

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap perekonomian di Kabupaten Sorong Selatan.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Revormasi Sistem Keuangan Negara**

Reformasi didalam manajemen keuangan Negara diawali dengan diberlakukan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Banyak hal yang harus disiapkan oleh pemerintah (departemen/lembaga). Perangkat-perangka pendukung harus disiapkan, mulai dari system pengelolaan keuangan Negara yang lebih transparan dan akuntabel sejalan dengan standar akuntansi pemerintah yang telah diberlakukan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005, tentang standar akuntansi pemerintah, sampai pada penyiapan SDM yang kompeten dalam pengelolaan keuangan Negara.

#### **Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah**

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut Mamesah dalam Halim (2004: 18), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah

merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dalam PERMENDAGRI Nomor. 13 Tahun 2006 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah menurut pasal 15 APBD disusun sesuai dengan kebutuhan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan berpedoman kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

### **Pengertian Pendapatan Nasional**

Konsep Pendapatan Nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir Wiliam Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya (*Inggris*) pada tahun 1963. Dalam perhitungannya, ia mengemukakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama tahun. Alat utama. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapat nasional menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross national product, GNP). (*Wikioedia.org*)

### **Pengeluaran Pemerintah Menurut Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004**

Pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah.

### **Belanja Langsung**

Menurut permendagri Nomor 13 tahun 2006 belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penerahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau

kesmua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan pengeluaran (*Output*) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

### Belanja Tidak Langsung

Menurut permendagri No 13 Tahun 2006 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : Belanja pegawai; Bunga; Subsidi; Hibah; Bantuan Sosial; Belanja bagi Hasil; Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga.

### Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Mceachern (2000), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Gross Domestic Product (GDP) artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. GDP juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat. Gross domestic product hanya mencakup barang dan jasa akhir, yaitu barang dan jasa yang dijual kepada pengguna yang terakhir. Untuk barang dan jasa yang dibeli untuk diproses lagi dan dijual lagi (Barang dan jasa intermediate) tidak dimasukkan dalam GDP untuk menghindari masalah double counting atau penghitungan ganda, yaitu menghitung suatu produk lebih dari satu kali.

### Penelitian Terdahulu

Tabel. 1 Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nursyawalina 2005	pengeluaran pemerintah daerah terhadap sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Lahat dan Muaraenim	Untuk melihat 4ocus4-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah terhadap ector ekonomi unggulan	Analisis Regresi Sederhana	Sektor ekonomi unggulan berdasarkan perhitungan LQ untuk kabupaten Muaraenim yaitu 4ector pertambangan dan penggalian dan 4ector listrik, gas dan air bersih,	Peneliti sebelumnya melakukan penelitian tentang Pengeluaran Pemerintah daerah terhadap sector ekonomi unggulan	Perbedaan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi tempat penelitian ini diadakan Kabupaten Sorong selatan, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Lahat dan Muaraenim
2	Jamzani Sodik, 2007	Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel 26 provonsi di Indonesia	Untuk menganalisis pengaruh variabel investasi swasta, investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, tenaga kerja dan tingkat keterbukaan	GLS ( <i>General least Square</i> ) panel data periode 1993-2003 26 propinsi di Indonesia,	Variabel investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Variabel keterbukaan ekonomi memiliki hubungan yang konsisten dengan teori	Persamaan peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah. Untuk menguji Variabel investasi swasta, investasi pemerintah, konsumsi pemerintah,	Perbedaan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi tempat penelitian ini diadakan kabupaten Sorong selatan. Sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Indonesia dan 26 Provinsi yang berada di Negara Indonesia

					tetapi tidak signifikan Variabel angkatan kerja berpengaruh signifikan dengan tanda $\alpha = 5\%$ untuk tahun 1993-1998 dan tahun 2000-2003	tenaga kerja dan tingkat keterbukaan	
3	Saad A. Alshahrani, Ali J. Alsadiq	Economic growth and government spending In Saudi Arabia	to explore the relationship between government spending and economic growth in Saudi Arabia, which is measured as the rate of growth of non-oil real GDP per capital.	Ordinary Least Square (OLS) Simple Regresi, VAR and data Time Series	in line with most of the literature on the effects of government spending on economic growth. While total expenditures have a positive short-term effect on production, primarily from current spending.	Researchers who had previously done research on exploring the relationship between government spending and economic growth in Saudi Arabia, which is measured as the rate of growth of non-oil real GDP per capital.	Previous analysis method uses the method of Ordinary Least Square (OLS) regression Simple, VAR and Data Time Series
4	Nwaeze Chinweoke, Njoku Ray, and Nwaeze Okeoma Paschal	Impact of government spending on Nigeria's economic growth (1992 – 2011)	to assess and evaluate the nature and impact of federal spending on economic growth in Nigeria between the years 1992 – 2011	Multiple regression and econometrics	Ho: There is no significant influence of federal spending on economic growth in Nigeria.	Equation $\alpha = 5\%$ with previous research on analyzing the impact of government spending on economic growth in Nigeria's 1992-2011	Researchers difference with previous studies is research sites in this study held in Sorong district south while research terbelakan doing research in Nigeria's

**Hipotesis**

Diduga Belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak berpengaruh terhadap perekonomian di Kabupaten Sorong Selatan, baik secara parsial atau sendiri-sendiri maupun secara simultan atau secara bersama-sama.

**2. METODE PENELITIAN**

**Data dan Sumber data**

Penelitian ini menggunakan Data Sekunder, yaitu data yang diambil secara langsung dari Instansi-instansi yang terkait dalam penelitian ini.

1. Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong Selatan.

2. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
3. SKPD-SKPD yang menerima kita tentang penelitian ini.

### Metode Pengumpulan Data

Data asli penelitian di kumpulkan dengan cermat mengunjungi langsung ke sumber data yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Di Kabupaten Sorong Selatan.

### Definisi dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan belanja daerah sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah belanja langsung dan belanja tidak langsung serta Perekonomian (PDRB).

### Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Rumus adalah :  $y = a + b^1X_1 + b^2X_2$

Dimana : y : PDRB rill (ADHK)

a : Konstan

b : Koefisien Regresi

$X^1$  : Belanja Langsung

$X^2$  : Belana Tidak Langsung

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

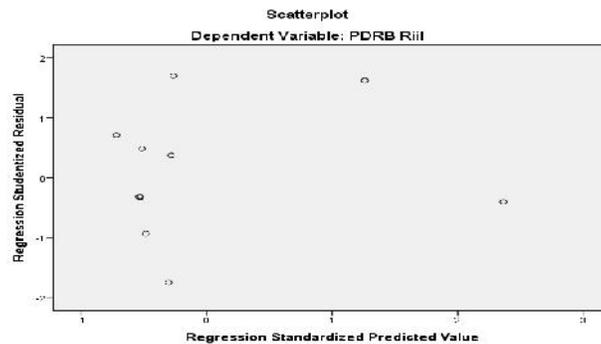
### Uji Multikolinieritas.

**Tabel 2: Output Pengujian Besaran Tolerance dan VIF**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Belanja Langsung	.995	1.005
Belanja Tidak Langsung	.995	1.005

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF dari variabel belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah lebih kecil dari. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas didalam variabel penelitian ini.

### Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 3. Output Pengujian Heterokedastisitas**  
*Sumber : Hasil Olah SPSS, 2015*

Hasil uji Heteroskedastisitas memperlihatkan sebaran plot dalam scatterplot tidak beraturan atau tidak membentuk suatu pola tertentu yang rapi dan teratur. Oleh karena itu berdasarkan hal ini maka di dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

### Uji Normalitas Data

**Tabel 4. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	PDRB Riil
N		10	10	10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	11.7297	11.6513	5.2757
	Std. Deviation	.65645	.98536	.04661
	Absolute	.428	.487	.199
Most Extreme Differences	Positive	.428	.487	.099
	Negative	-.280	-.348	-.199
Kolmogorov-Smirnov Z		1.353	1.541	.631
Asymp. Sig. (2-tailed)		.051	.017	.821

Hasil uji normalitas data menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* untuk variabel Belanja langsung adalah 0,051, variabel Belanja Tidak Langsung sebesar 0,017 dan variabel terikat PDRB rill sebesar 0,821. Oleh karena ketiga-tiganya memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,051 maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tersebar secara normal.

## Persamaan Regresi Berganda

**Tabel. 5 . Persamaan Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.853	.356		13.630	.000
Belanja Langsung	.026	.025	.368	1.066	.322
Belanja Tidak Langsung	.010	.016	.211	.611	.560

Berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel output SPSS ini maka persamaan regresinya adalah :  $PDRB=4,853+0,026BR+0,10BM$  Dapat diinterpretasikan :

- Nilai Konstanta 4,853 mengandung arti jika Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar nol maka Perekonomian 4,853%.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel Belanja Langsung (BL) sebesar 0,026. Hal ini mengandung arti jika belanja langsung naik sebesar 1% maka perekonomian (PDRB) akan turun sebesar 0,026%.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 0,010. Hal ini mengandung arti jika belanja tidak langsung meningkat 1% maka Perekonomian (PDRB) juga akan meningkat sebesar 0,010%.

## Uji Korelasi Berganda dan Determinan

Hasil uji korelasi berganda dan determinan adalah sebagai berikut :

**Tabel 6. Uji Korelasi Berganda dan Determinan**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.411 <sup>a</sup>	.169	-.068	.04817

Berdasarkan data output SPSS ini maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai koefisien korelasi  $R$  sebesar 41,1% mengandung arti bahwa korelasi atau keeratan hubungan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebagai variabel bebas dan perekonomian sebagai variabel terikat agak lemah.
- Nilai koefisien determinan (R Square atau  $R^2$ ) sebesar 16,9% mengandung arti Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung bersama-sama menyumbang atau memberi kontribusi terhadap perkembangan perekonomian hanya sebesar 16,9% sedangkan sisinya sebesar 84,1% di sumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

**Uji t**

Hasil uji pengaruh secara parsial atau sendiri-sendiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagai variabel bebas terhadap perekonomian (PDRB) sebagai Variabel terikat adalah sebagai berikut :

**Tabel 7. Uji t**

Model	t	Sig.
(Constant)	13,630	000
Belanja Langsung	1.066	322
Belanja Tidak Langsung	611	560

Hasil uji t dalam output SPSS menunjukkan bahwa :

- ❖ Nilai t hitung Variabel Belanja langsung adalah sebesar 13,630 Uji t  $\leq 0,025 = 2,36$  sedangkan t hitung = (1,066) artinya t hitung lebih kecil dari t tabel sehingga Ho diterima. Oleh secara parsial Belanja langsung tidak mempengaruhi Perekonomian (PDRB).
- ❖ Nilai t hitung dari Variabel Belanja tidak langsung adalah 0,611. Nilai t tabel Uji t  $\leq 0,025 = 2,36$  sedangkan t hitung = (1,066) artinya t hitung lebih kecil dari t tabel sehingga Ho diterima. Oleh secara parsial Belanja Modal tidak mempengaruhi Perekonomian (PDRB).

**Uji F**

**Tabel 8. Uji F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.003	2	.002	.713	.523 <sup>b</sup>
Residual	.016	7	.002		
Total	.020	9			

Hasil uji F dalam output SPSS menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah sebesar 0.713. Nilai uji F table 4,76 Nilai F hitung (0,713) < F table (4,76) sehingga Ho diterima atau secara bersama-sama Belanja langsung dan Belanja tidak langsung tidak mempunyai pengaruh terhadap Perekonomian (PDRB).

**Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah negatif. Hal ini agak bertentangan dengan teori tentang ekonomi keuangan daerah yang membahas mengenai APBD yang didasarkan pada semangat Undang-Undang otonomi daerah.

Hasil uji Korelasi berganda dan Determinan juga menunjukkan bahwa hasil belanja langsung dan belanja tidak langsung bersama-sama menyumbang atau memberi kontribusi terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Sorong Selatan.

Hasil penelitian mengenai uji t (parsial) dan Uji F (Simultaan) juga menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan maka Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tidak mempunyai mempengaruhi terhadap Perekonomian Kabupaten Sorong Selatan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja langsung tidak berpengaruh terhadap Perekonomian Kabupaten Sorong Selatan.

Belanja tidak langsung tidak berpengaruh terhadap Perekonomian di Kabupaten Sorong selatan.

Secara bersama-sama atau simultan belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak berpengaruh terhadap Perekonomian Kabupaten Sorong Selatan.

Besarnya proporsi belanja langsung terhadap total belanja adalah sebesar rata-rata 4,853% sedangkan proporsi belanja tidak langsung terhadap total belanja adalah rata-rata 0,010% pertahun.

##### **Saran**

Pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan harus lebih dapat mengefisiensikan jumlah pegawai yang dimilikinya dengan cara lebih fokus pada kualitas pegawai daripada kuantitasnya dan manfaat teknologi, dengan begitu diharapkan pemerintah bisa lebih menekan anggaran belanja pegawai yang selama ini menjadi pengeluaran terbesar pemerintah.

Penghapusan honor belanja pegawai yang melekat pada pos belanja langsung atau lebih spesifik pada belanja modal dapat lebih mengefisiensi penegluaran belaja.

Untuk lebih mengoptimalkan pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap perekonomian di Kabupaten Sorong Selatan, maka di sarankan agar proporsi belanja langsung ini lebih di perbesar dalam rangka perataan APBD Kabupaten Sorong Selatan.

#### **Daftar Pustaka**

- Pramono Hariadi, Yanuar E. Restiano, Icuk Rangga Rawono, 2010 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Drs. M. Suparmoko, M.A., Ph.D. 2003 *Keuangan Negara Edisi 5*. Yogyakarta
- Dr. Rudy Badrudin, M.Si 2012 *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

**Jurnal**

Nwaeze Chinweoke Njoki Ray and Nwaeze Okeoma Paschal : *Impact Of Government Expenditure On Nigeria's Economic Growth (1992-2011)*

Saad A. Alshahrani, Ali J. Alsadiq : *Economic Growth and Government Spending In Saudi Arabiah : an Empirical Investigation.*